

RENCANA KERJA 2025



(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik dan hidayah - Nya sehingga rencana kerja ini dapat terselesaikan. Dengan merujuk pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2022 - 2026 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai 2022 - 2026.

Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Kami menyadari Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD ini masih jauh dari sempurna disebabkan keterbatasan yang ada pada kami, maka sangat diharapkan saran maupun pendapat dari semua pihak demi kesempurnaannya.

Demikian, kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Dumai, Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP.19840511 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	13
1. Tingkat Kinerja Pelayanan	13
2. Permasalahan dan Hambatan	14
3. Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	15
4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan	15
5. Formulasi Isu – Isu Penting	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	24
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	28
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	28
BAB V PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.....	7
TABEL 2.2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	12
TABEL 2.4	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023	18
TABEL 2.5	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025	22
TABEL 4.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (RENJA-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, hal ini untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyusunan renja, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Proses penyusunan rencana kerja meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja; (3) Penyusunan Rancangan Renja; (4) Pelaksanaan Forum/ Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renja; (6) Penetapan Renja.

Renja memiliki keterkaitan dengan perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan tentang :

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar hukum, yaitu :

- a. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Nomor 50 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829)
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;

- i. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
- j. Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 25 seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting, menjembatani Antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Daerah. Secara makro maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

Maksud : Memberikan arahan dan pedoman dalam penentuan kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai di Tahun 2024.

Tujuan :

1. Menyediakan data capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada tahun 2023
2. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam bentuk dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2025.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP KOTA DUMAI TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu disesuaikan antara target yang telah ditetapkan dengan Realisasi yang telah dicapai. Pelaksanaan Renja Tahun Lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk Renja Tahun berjalan.

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 12.294.971.059,- (Dua Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah), dengan realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sebesar Rp. 12.021.903.148,- (Dua Belas Miliar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) atau capaian realisasi 97,77%.

Tabel 2.1
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Non Urusan Dan Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	URAIAN PROGRAM	KEUANGAN		
		PAGU (RP)	REALISASI	% CAPAIAN
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.003.000	32.541.998	98,6
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.018.700	7.743.500	96,5
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.374.100	2.370.500	99,8
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.967.900	2.967.900	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.939.100	1.939.100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.724.200	2.724.200	100
	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	14.979.000	14.796.798	98,7
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.573.711.309	6.319.585.278	96,1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.563.413.800	6.309.287.769	96,1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.734.900	2.734.900	100

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.977.809	2.977.809	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.584.800	4.584.800	100
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	11.663.100	11.663.100	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.584.800	4.584.800	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.572.100	2.572.100	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.506.200	4.506.200	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	365.439.200	365.310.200	99,9
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	365.439.200	365.439.200	99,9
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	496.328.950	495.697.748	98,8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.289.950	9.289.950	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.153.100	59.926.220	99,6
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.704.400	74.579.400	99,8
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.733.500	15.485.700	99,4
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	24.480.000	24.480.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.968.000	311.936.478	99,9
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	967.141.300	965.093.300	99,7
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000	125.160.000	99,9
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000	598.000.000	99,6
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	241.933.300	241.933.300	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.240.014.400	2.237.091.650	99,8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	5.500.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.400.000	132.318.450	99,9
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.890.000	153.850.000	98,6
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.946.224.400	1.945.423.200	99,9
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.270.000	534.308.274	99,6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Operasional Atau Lapangan	316.980.000	316.893.000	99,9
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.290.000	19.290.000	100
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	198.125.274	99

	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	688.622.800	685.861.800	99,5
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	470.626.700	470.526.700	99,9
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	15.000.000	15.000.000	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	72.300.000	72.215.000	99,8
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.544.000	97.531.000	97,9
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	16.130.000	15.567.000	96,5
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.022.100	15.022.100	100
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	221.447.000	221.447.000	100
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36.647.000	36.647.000	100
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	79.950.000	79.950.000	100
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	104.850.000	104.850.000	100
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	161.330.000	153.302.800	95
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	161.330.000	153.302.800	95
	Total Anggaran	12.294.971.059	12.021.903.148	97,77

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan;

- c. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai s.d. tahun 2023 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut.

**Tabel T-C 2.9**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

Nama Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

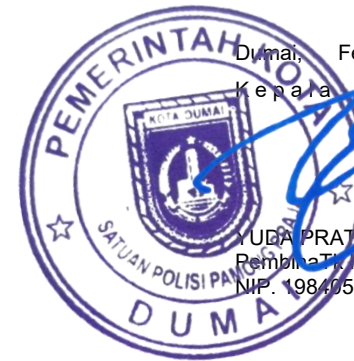
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai	100 %							
1.05.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	5 Kasus	12 Bulan	5 Kasus	5 Kasus	100%	100 %	-	-
1.05.02.2.01.02	Sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Bulan	1 Kasus	-	-	-	100 %	-	-



	Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa									
1.05.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100 %	1 Dokumen	100 %
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100 %	1 Dokumen	100 %
1.05.02.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksana dan Terlaksananya Pelatihan Dasar Satpol PP	3 Orang		5 Orang	5 Orang	100%	100 %	-	-
1.05.02.2.01.07	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	-	-	-	-	100 %	1 Dokumen	100 %
1.05.02.2..02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100 %							
1.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	1 Laporan	-	-	-	-	100 %	-	-
1.05.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	100 %	100 Usaha	100 %
1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	100 %	1 Kali	100 %



1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan	100 %							
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	-	-			100 %	1 Laporan	1 Laporan



Dumai, Februari 2024

Kepala

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Pembina

NIP. 19840511 200212 1 001

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2023 Khusus untuk Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, secara khusus tidak dianggarkan di sub kegiatan tersebut, dikarenakan pencapaian yang cenderung kecil pada tahun anggaran 2021. Kecilnya pencapaian tersebut dikarenakan untuk tahun 2021, Jumlah unjuk rasa dan Kerusuhan Massa yang terjadi dan di amankan oleh petugas Satpol PP pada Tahun 2021 hanya ada 1 kali kegiatan. Untuk mengantisipasi adanya unjuk rasa dan kerusuhan massa pada tahun 2022, dan 2023, penganggaran untuk sub kegiatan tersebut ditumpangkan dalam sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.

Selain itu, pada tahun 2023 ada beberapa sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, antara lain: Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota, serta Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, dikarenakan keterbatasan pagu anggaran yang tersedia.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.2.1 Sumber Daya yang tersedia

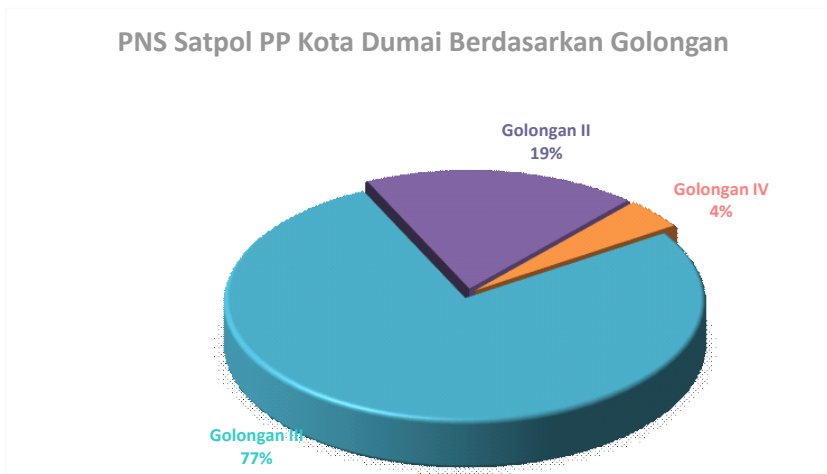
Jumlah personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai saat ini berjumlah 48 orang pegawai negeri sipil serta 99 orang TKPK Bantuan Polisi Pamong Praja. Komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut:



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Gambar 2.1

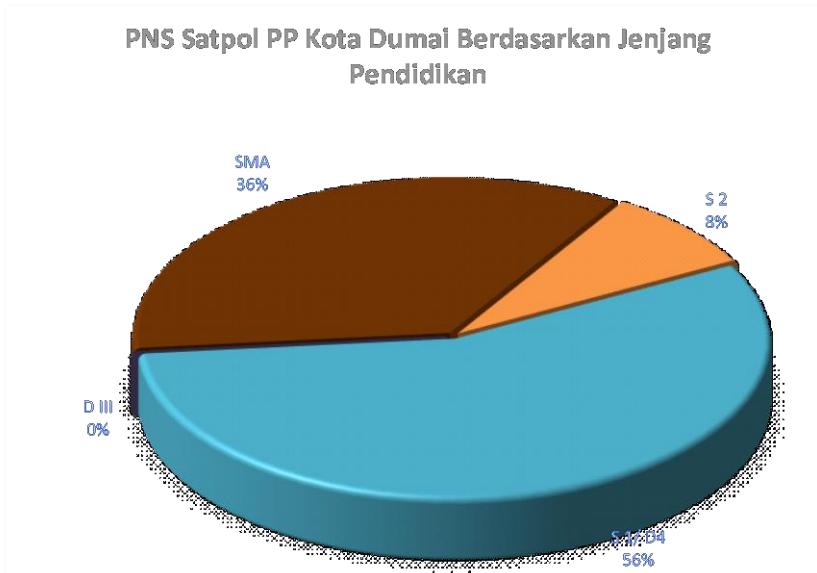
PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, apabila di bedakan berdasarkan Golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 2 Orang, Golongan III sebanyak 37 Orang dan Golongan II sebanyak 9 Orang



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Gambar 2.2

Sedangkan bila di data menurut Jenjang Pendidikan adalah Strata 2 (S2) terdiri dari 4 Orang, Sarjana (S1/ D4) terdiri dari 27 Orang, D3 terdiri dari 0 Orang, dan SMA terdiri dari 17 Orang.



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Gambar 2.3

2.2.2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satpol PP Kota Dumai sebagai aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Satpol PP merupakan unsur pembantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Dumai menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal.

Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pengukuran hasil kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan utama ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya sebagaimana dapat dilihat di dalam lampiran pada Tabel 2.2 di bawah ini.



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Dumai

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	%		100	100	100	100	100	-	100	100	
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman dan Keindahan)	%		100	100	100	100	100	-	100	100	
3.	Persentase penegakan peraturan daerah/perwako	%		100	100	100	100	100	-	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat Kinerja Pelayanan

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat;
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur;
- c. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai:

Faktor Internal :

- a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil;
(Staf yang telah mengikuti latihan dasar Satpol PP bagi staf maupun pejabat eselon masih sedikit, masih kurangnya tenaga PPNS dimana yang ada saat ini hanya ada 3 (tiga) orang, sementara dalam pelaksanaan tugas Satpol PP yang sesuai dengan Tupoksi sangat diperlukan adanya PPNS tersebut, serta diperlukan diklat teknis lainnya seperti Pelatihan Dasar Povost dan Diklat Fungsional Satpol PP).
- b. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil;
- c. Kurangnya kemampuan anggota dalam mengimplementasikan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;

Faktor Eksternal :

- a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk Hukum lainnya oleh anggota masyarakat atau badan usaha;
- b. Meningkatnya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Masih banyaknya praktek – praktek prostitusi terselubung ditengah masyarakat;
- d. Meningkatnya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Berdirinya bangunan / rumah liar atau bangunan tanpa IMB.

3. Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam memantapkan perwujudan otonomi daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai perlu meningkatkan perannya dalam tugas keamanan, dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan/ keputusan walikota serta pengendalian operasional. Guna

mempersiapkan program/ kegiatan kedepan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan Kota Dumai.

Visi Pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2025 adalah :

“TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU (DUMAI KOTA IDAMAN)”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan SATPOL PP Kota Dumai dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup nasional, regional maupun global.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Tantangan yang dirasa SATPOL PP Kota Dumai pada saat ini dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. belum optimalnya dukungan masyarakat Kota Dumai dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- b. koordinasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat belum sinergis dan terpadu;
- c. masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiba umum;
- d. masih terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal SATPOL PP Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Peran SATPOL PP sebagai Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat semakin strategis dalam menentukan terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kota Dumai dengan didukung Peraturan Daerah Kota

- Dumai Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faximile;
 3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan strategis SATPOL PP;
 4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Dumai;
 5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia;
 6. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang didalam penyusunan produk-produk penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas.

5. Formulasi Isu-isu Penting

Penetapan isu strategis dimaksud berkenaan dengan Permasalahan yang menyangkut Satuan Polisi Pamong Praja adalah Produk hukum daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang masih rendah. Dalam menyikapi hal-hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban tersebut harus didukung oleh kesiapan SDM, sarana dan prasarana yang memadai serta kebijakan-kebijakan strategis dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

Strategi harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada lampiran tabel 2.4 di bawah ini :

**Tabel 2.4**

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA DUMAI**

SATPOL PP KOTA DUMAI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Terciptanya Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Kota Dumai	100%	9.395.800.000	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Persentase Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	9.395.800.000	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai	100%	8.924.000.000	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai		8,974,000,000	
1.1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Dumai	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	5 Kegiatan	8.277.200.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Dumai	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 Kasus	8.327.200.000	



Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Dumai	Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Terlaksana	12 Bulan	25.000.000	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Dumai	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Bulan	25.000.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Terlaksananya HUT Satpol PP dan Linmas	2 Kegiatan	175.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	175.000.000	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Jumlah Pelatihan Linmas yang Terlaksana serta Lomba Poskamling Tingkat Kota Dumai	2 Kali	150.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	150.000.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Dumai	1. Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksana, 2. Terlaksananya Pelatihan Dasar Satpol PP	2 Kegiatan	36.800.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Dumai	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	136.800.000	
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Terlaksana	12 Bulan	60.000.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	60.000.000	



	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	30.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	30.000.000	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kota Dumai	Tersusunnya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kota Dumai	Tersusunnya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	
	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Dumai	Tersedianya Pelayanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	12 Bulan	150.000.000	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	20.000.000	
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100 %	360.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100 %	310.000.000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Terlaksana	7 Kecamatan	50.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	1 Laporan	50.000.000	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Jumlah Usaha yang Memiliki Izin Lengkap di Kota Dumai	200 Usaha	60.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Laporan	60.000.000	



	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Jumlah Kegiatan Tim Yustisi Dilaksanakan	2 Kali	250.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	200.000.000	
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan	100 %	111.800.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan	100 %	111.800.000	
3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Dumai	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat PPNS	3 Orang	111.800.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	111.800.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun seluruh OPD Kota Dumai yang mana terdapat beberapa usulan terkait peningkatan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan tingkat kota. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Secara umum, semua kebutuhan masyarakat yang tertampung pada hasil Musrenbang maupun melalui Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pokir DPRD) telah terealisasi berdasarkan skala prioritas dan sudah diakomodir dalam Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Namun karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka usulan yang diakomodir di dalam Renja sudah melalui penelaahan berdasarkan skala prioritas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255) : “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai adalah terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan serta sebagai arahan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemafaatan sumber daya manusia yang dimiliki, guna mendukung pembangunan daerah dan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan Satpol PP Kota Dumai.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2025 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rencana Program kegiatan Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun Anggaran 2025;

- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun Anggaran 2025;
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Bidang – bidang, Sub. Bagian dan Seksi - seksi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2025 adalah:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025;
- b. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah yang berkeadilan;
- c. Terwujudnya konsistensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan yang dicapai;
- d. Tercapainya pemanfaatan sumber daya manusia secara efisien, efektif, yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Menetapkan 2 (dua) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2 05 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
2 05 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
2 05 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
2 05 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD
2 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan
1	05	01	2.09	0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1	05	02	2.01	0007	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1	05	02	2.01	0009	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan
1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	
1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1	05	02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS
1	05	02	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

B A B I V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang biasa membantu perangkat daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana perangkat daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, disamping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula. Sehubungan diuraikan dalam Bab III, bahwa dalam 5 tahun ke depan tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada tahun 2025 ini seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung kesuksesan visi misi Kota Dumai dan visi misi Walikota serta merealisasikan target pada urusan wajib pelayanan dasar, untuk lebih jelasnya pada tabel dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut keterkaitan sasaran, indicator sasaran, target yang ditetapkan pada tahun 2025 serta program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukungnya disertai dengan sumber pendanaannya Rencana kerja dan pendanaan ini, nantinya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dan rencana aksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.



Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA DUMAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	100%	29.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	31,000,000		
2	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5,000,000
2	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000
2	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000



2	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.000.000
2	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.500.000
2	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	8.000.000
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	6.401.163.040			100%	6.790.118.453
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	6.376.163.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		61 Orang	6.765.118.453
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000
1.	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	14.000.000



1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.000.000
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	28.000,000			100%	28.000,000
1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	8.000.000
1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10,000,000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	211.200.000			100%	220.000.000
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	211.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	220.000.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	587.500.000			100%	597,500,000
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	25.000.000
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.0000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	100.0000.000



1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	Dana Transfer Umum-Danaf Alokasi Umum		1 Paket	80.000.000
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	22.000.000
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	27.500.000
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	300.000.000
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	40.000.000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	174.169.820	-		100%	810.000.000
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	-
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	60.360.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	80.000.000
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	113.809.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	190.000.000
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	50.000.000
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	40.000.000



1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.876.410.880			100%	2.613.488.960
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	135.000.000
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	230.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	230.350.000
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.501.060.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.238.138.960
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	429.630.000			100%	678,000,000
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	38.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	38.000.000
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Unit	350.000.000
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	41.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	55.000.000



1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	200.000.000
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	35.000.000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai	100 %	1.067.055.000			100%	1.348.800.000
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.180.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	160.000.000
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	145.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	145.000.000
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Orang	116.800.000



1	05	02	2.01	0007	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	29.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	43.200.000
1	05	02	2.01	0009	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	20.000.000
1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kota Dumai, dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	10 Orang	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10 Orang	67.350.000
1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Kota Dumai, dan Luar Daerah	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	7 Orang	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7 Orang	20.000.000
1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kota Dumai, dan Luar Daerah	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	2 Orang	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Orang	39.250.000
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 Laporan	813.175.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Laporan	658.200.000



1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10 Laporan	30.000.000
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	19.000.000
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	30.000.000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100%	743.864.000			100%	530.000.000
1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	100.000.000
1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	20.000.000
1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0 Unit	-



1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	40.000.000
1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	50.000.000
1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	30.000.000
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	60.000.000
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	743.864.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	150.000.000
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	80.000.000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan	100%	-		100%	299.164.767
1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokmen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokmen	60.000.000
1	05	02	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokmen	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokmen	60.000.000



1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	59.164.767				
1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	50.000.000				
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	70.000.000				
TOTAL													12.547.992.740				13.946.072.180

BAB V

P E N U T U P

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai akan dilaksanakan pada tahun 2025. Selanjutnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - OPD) Tahun 2025.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dan Kepala OPD mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Walikota Dumai.

Dumai, Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Pembina Tk I

NIP.19840511 200212 1 001